

32/LP/FT/03/2012

Laporan Penelitian

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP HAK KEWARISAN ZAW AL-ARHAM

61

Oleh :

Hasan Matsum, S.Ag, M.Ag



SU
.4
T

FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

2012

Laporan Penelitian

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP HAK KEWARISAN ZAW AL-ARHAM

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

Hasan Usman, S.Ag, M.Ag

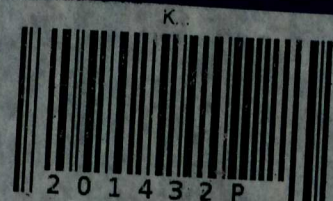
Diserahkan pada tanggal 22 Mei 2012
kepada Perpustakaan IAIN-SU
Medan



2012
2X4.4
MAT
L

FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

2012



201432P

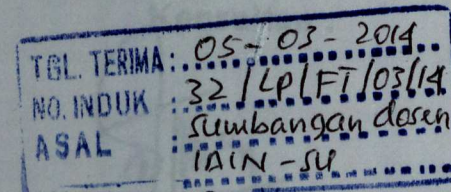
Laporan Penelitian

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP HAK KEWARISAN ZAW AL-ARHAM**

Oleh:



Hasan Matsum, S.Ag, M.Ag



P
2X4.4
MAT
le

FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

2012

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP HAK KEWARISAN ZAW AL-ARHAM**

Oleh :

H. Hasan Matsum, M.Ag

NIP : 1969092520080 1 1014

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Konsultan :

DR. Hj. Hafsa, MA

19640527199103 2 001

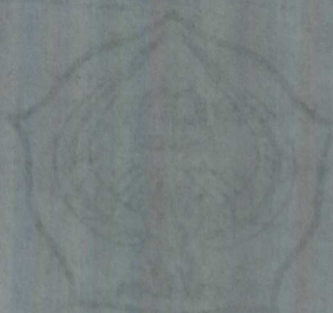
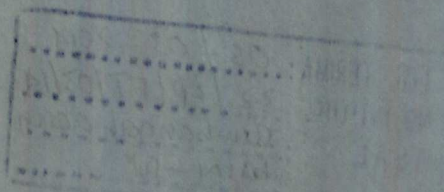
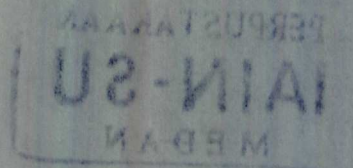
Lektor Kepala Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Medan, November 2012

Penyusun

**FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA
UTARA MEDAN**

2012



H. HX-2
TAM
2

FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

2012

KATAPENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas izin dan karunia-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw pembawa rahmat bagi sekalian alam.

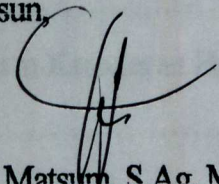
Penyusun menyadari bahwa kelemahan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini membuka peluang kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran yang membangun dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Penyusun juga menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak terlepas dari partisipasi, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan.

Sebagai kata akhir penyusun berdo'a agar segala kebaikan yang mereka berikan dibalas oleh Allah Swt. dan menjadi pahala jariyah. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, November 2012

Penyusun,



Hasan Matsum, S.Ag, M.Ag

Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin dari Allah SWT, saya telah dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini. Dalam proses penulisan skripsi ini, saya telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini.

2. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses pembelajaran di kampus.

3. Bapak/Ibu Orang Tua yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

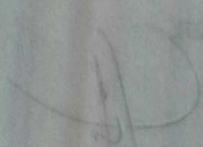
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin dari Allah SWT, saya telah dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini.

Medan, 2013



Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin dari Allah SWT, saya telah dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini.

A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG ZAW AL-ARHAM

A. Pengertian	18
B. Beberapa Pemikiran Tentang Kewarisan Zaw al-Arham	
1. Kewarisan Zaw al-Arham Menurut Mazhab Sunni.	18
2. Kewarisan Zaw al-Arham Menurut Syi'ah.....	37
3. Kewarisan Zaw al-Arham Dalam KHI.....	43

BAB III KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP HAK KEWARISAN ZAW AL-ARHAM

A. Profil Kecamatan Medan Barat	49
B. Karakteristik Responden	50
C. Kewarisan Zaw al-arham Dalam Kesadaran Hukum Masyarakat	51

BAB IV KESIMPULAN 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim faraid telah menjadi hukum positif, meskipun – sebagaimana yang berlaku di Indonesia – hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara yang lain hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

Pemberlakuan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa tentang pembagian harta waris dan pada saat yang sama ditujukan untuk kemaslahatan hidup manusia, karena tidak jarang ketika harta waris dibagi-bagi diantara para ahli waris terjadi persengketaan diantara mereka terutama berkenaan dengan jumlah perolehan masing-masing para ahli waris.

Klausul yang menjelaskan tentang kewarisan baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis sebenarnya bersifat sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja tidak semua kasus kewarisan memiliki dasar hukum yang tegas dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Untuk kasus-kasus kewarisan yang tidak dijelaskan secara rinci biasanya akan menimbulkan interpretasi dan perumusan dari kalangan mujtahid dengan daya nalar yang tidak bebas dari pengaruh budaya lokal dan lingkungannya – dalam hal ini

diasumsikan budaya Arab dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu umat yang hidup dalam budaya non-Arab dalam kurun waktu yang berbeda terkadang mengalami kesulitan dalam menjalankannya.

Berbagai kasus kewarisan yang muncul dikemudian hari memang ada yang terjawab langsung oleh jawaban yang telah disediakan, diterima dengan senang hati atau tidak, dan ada pula yang belum terjawab. Hal ini menjadikan hukum kewarisan Islam yang mulanya sederhana menjadi rumit.

Salah satu kasus yang muncul dalam hukum kewarisan Islam ialah wacana tentang kewarisan *zaw al-arham*. Secara umum yang dimaksud dengan *zaw al-arham* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan.¹ Di kalangan ulama ahlu sunnah kata *zaw al-arham* ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan kepada orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah bagiannya dalam Alquran dan tidak pula termasuk kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi melalui hadis berikut :²

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن

عباس عن النبي صلعم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

(رواه البخاري)

Artinya : Menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata,

¹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT AMA'ARIF, 1971), hlm. 351.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.

menceritakan kepada kami Wuhaib, dia berkata, menceritakan kepada kami Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. dia bersabda, “berikanlah kepada orang-orang yang memiliki bagian tetap sesuai dengan haknya masing-masing, lalu sisanya berikanlah kepada kelompok laki-laki (*‘asabah*) yang lebih dekat dengan pewaris”. (HR. al-Bukhari)

Memang sejak lama, *zaw al-arham* telah menjadi fenomena dalam hukum kewarisan Islam. Selain tidak dijelaskan dalam Alquran ternyata pada tataran hadis ditemukan pula perbedaan tentang kewarisan *zaw al-arham* tersebut. Menurut hadis yang bersumber dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif³, *zaw al-arham* berhak terhadap harta warisan tentunya ketika

³ Redaksi lengkap hadis dimaksud adalah :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا : حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياس بن أبي ربيعة الزرقى عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيفة الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال, فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر, فكتب إليه عمر : أن النبي صلعم قال : الله ورسوله مولى من لى مولى له , والخال وارث من لا وارث له (رواه ابن ماجه)

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata ; Menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdirrahman bin al-Haris bin Ayyas bin Abi Rabi'ah az-Zuraqi dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif al-Ansari dari Abi Umamah bin Sahl bin Hunaif ; Bahwa seorang laki-laki memanah seseorang yang kemudian meninggal dunia dia tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang paman dari pihak ibu, maka Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut lalu Umar menjawab surat tersebut dengan mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda ; Allah dan RasulNya adalah tuan bagi mereka yang tidak punya tuan dan paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi mereka yang tidak

tidak bersama ashab alfurud atau 'asabah. Selain hadis ini ditemukan pula hadis lain yang senada dengan hal tersebut diantaranya adalah hadis yang bersumber dari A'isyah ra. dan Miqdam Abi Karimah, seorang sahabat Rasul yang berasal dari negeri Syam.⁴ Berbeda dengan kehendak hadis yang berasal dari ketiga sumber tersebut, menurut hadis yang bersumber dari Atho' bin Yasar dan Zaid bin Aslam *zaw al-arham* tidak berhak memperoleh harta warisan. Kedua hadis ini diriwayatkan masing-masing oleh Abu Daud dan an-Nasa'i sebagai hadis mursal.⁵

Dalam tataran fikih, fenomena kewarisan *zaw al-arham* ini mendapat perhatian yang serius. Ibnu Hazm misalnya, keprihatinannya terhadap nasib *zaw al-arham* telah mengilhaminya untuk merumuskan satu sistim pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan jalan wasiat

memiliki ahli waris. Lihat Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Asriyah, 2006), hlm. 481.

⁴ Redaksi hadis dimaksud adalah :

... والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه

Artinya : Paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris (selain dia). Dia (paman) turut menanggung beban diyat, maka dia mewarisi. *Ibid*

⁵ Redaksi hadis dimaksud adalah :

... أن النبي قال : سألت عزوجل عن ميراث العمة والخاله فسارني أن لاميراث لهما

Artinya : Bahwa Nabi Saw. berkata, Aku bertanya kepada Allah 'Azza wa Jalla tentang hak kewarisan bibi dari pihak ayah dan pihak ibu, maka diilhamkan kepadaku bahwa tidak ada hak kewarisan bagi keduanya. Lihat Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwazi Syarh Jami' at-Turmuzi*, Juz VI, (Beirut : Dar Ihya at-Turas al-Arabiyy, tt), hlm. 277.

wajibah.⁶ Dalam tahap selanjutnya konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm ini dipakai di beberapa negara guna mengantisipasi keberadaan *zaw al-arham*.⁷

Khusus di Indonesia, *zaw al-arham* ini belum diatur melalui suatu peraturan tertentu, namun karena ia merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, maka diantisipasi melalui lembaga penggantian tempat ahli waris. Para ahli hukum Islam di Indonesia membuat satu ketetapan yang tertuang dalam KHI pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Secara sederhana pasal ini merupakan hasil kompromi dari ketetapan penggantian tempat ahli waris yang ada dalam hukum perdata (BW) dan wasiat wajibah versi Ibnu Hazm, yaitu mengangkat keturunan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris ke tempat ahli waris, namun tidak menggantikan ahli waris dalam arti sepenuhnya, dengan kata lain dia tidak harus menerima hak waris sebesar yang seyogianya diterima oleh ahli waris yang digantikannya –

⁶ Dalam kitabnya *al-Muhalla* beliau mengatakan :

وفرض على كل مسلم أن يوصي لقربته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما
لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون

Artinya : Dan diwajibkan atas setiap orang Islam untuk berwasiat kepada setiap karib kerabatnya yang tidak memperoleh warisan, mungkin karena statusnya sebagai seorang hamba, atau kafir, karena mereka terhibat, atau karena mereka tidak termasuk sebagai ahli waris. Selanjutnya lihat Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Izzam, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 314

⁷ Negara yang memakai konsep wasiat wajibah Ibnu Hazm tersebut antara lain adalah Mesir dan Syiria. Lihat Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Bandung : Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 72 dan 77.

sebagaimana dalam hukum perdata (BW)⁸ – tapi hanya sebesar yang diterima oleh ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikannya.

Jika diperhatikan secara mendalam, pasal 185 tentang ahli waris pengganti ini tidaklah secara serta merta dapat menggantikan institusi *zaw al-arham*, karena secara tekstual pasal ini hanya mengadopsi penggantian tempat untuk jalur anak tidak jalur lainnya baik jalur ayah/ibu, saudara/saudari, maupun paman/bibi. Lagi pula seseorang muncul sebagai ahli waris pengganti apabila orang yang digantikannya memiliki hak waris, baik sebagai *ashabul furud* maupun 'asabah, sedangkan pada kasus *zaw al-arham* tidak ada ahli waris yang digantikan ia muncul semata-mata karena tidak ada kelompok ahli waris yang lain.

Sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya, institusi *zaw al-arham* ini merupakan sesuatu yang terus menerus diperdebatkan. Ketidadaan klausul yang mengatur hak *zaw al-arham* dalam KHI boleh jadi karena menghindari perdebatan tersebut. Namun apakah fenomena tentang *zaw al-arham* ini akan terus menerus didiamkan tanpa suatu aturan yang pasti. idealnya tidaklah demikian.⁹ Fenomena *zaw al-arham* membutuhkan jawaban bahkan

⁸ Pasal-pasal yang mengatur ahli waris pengganti ini dimulai dari pasal 841 hingga 848. lebih lanjut dapat dilihat dalam R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), hlm. 187 – 188.

⁹ Kekosongan hukum yang mengatur *zaw al-arham* ini ternyata telah menimbulkan dilema hukum di Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 1982 Pengadilan Agama Medan telah menetapkan permohonan waris atas nama pemohon Murni yang beralamat di Jl. Medan Area Selatan, Gg. Puri No. 925 Kotamadya Medan. Dalam ketetapan itu disebutkan bahwa Murni sebagai isteri almarhum Saleh bin Yosodipo berhak sebagai ahli waris dan memperoleh ¼ harta yang ditinggalkan pewaris, karena tidak ada anak. Sisa harta, karena tidak ada *ashabul furud* dan 'asabah, diserahkan kepada *zaw al-arham*, namun hingga kini harta tersebut belum diterima oleh *zaw al-arham* karena berbagai alasan diantaranya adalah bahwa baitul mal / BAZ lebih berhak daripada *zaw al-arham*.

pengaturan melalui hukum positif di Indonesia. Hanya saja karena ia tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dari Alquran maupun hadis, maka perlu dicari dalil-dalil pendukung guna mewujudkan kemaslahatan dan rasa keadilan terhadap pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalil-dalil pendukung tersebut antara lain adalah perasaan hukum masyarakat yang bersifat alamiyah yang biasa disebut dengan *Common Sense* atau *masalahah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan tentang pandangan hukum masyarakat terhadap kewarisan *zaw al-arham*, sebagaimana dimaksud dalam latar belakang masalah di atas, hal-hal yang signifikan untuk dipertanyakan adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum masyarakat terhadap hak kewarisan *zaw al-arham* ?
2. Apakah hak *haitul mal* didahulukan daripada *zaw al-arham* ?
3. Apakah kewarisan *zaw al-arham* dilakukan melalui sistem *qarabat*/penderajatan, *tanzil*/penggantian tempat atau dibagi rata diantara seluruh ahli waris *zaw al-arham* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui jawaban terhadap pokok permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum masyarakat terhadap hak kewarisan *zaw al-arham*.

2. Untuk mengetahui posisi *zaw al-arham* jika berhadapan dengan baitul mal.
3. Untuk mengetahui sistem yang diterapkan dalam proses pewarisan harta kepada *zaw al-arham*.

Sementara kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi informasi yang berharga bagi para praktisi hukum, legislator, dan pemerintah, bahwa untuk menetapkan hukum suatu kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak cukup hanya melalui pendekatan dalil-dalil normatif tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kasus tersebut terjadi.

D. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah atau kata kunci yang dipergunakan dalam tulisan ini.

1. Berawal dari kata kesadaran, kata ini berasal dari kata sadar yang berarti tahu, paham.¹⁰ Diberi akhiran an menjadi kata benda yang berarti hasil mengetahui atau.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pandangan di sini adalah pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap kewarisan *zaw al-arham*.
2. Hukum, secara bahasa kata ini berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 821.

¹¹ *Ibid.*

atau pemerintah.¹² Sedangkan menurut istilah berarti keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, yang dimaksudkan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sifat utama hukum itu adalah keadilan dan kemanfaatan.¹³ Terkait dengan pengertian tersebut maka yang dimaksud hukum dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan ini diasumsikan sebagian besar dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Dikatakan demikian karena mazhab inilah yang dianut oleh mayoritas masyarakat di tempat penelitian ini dilakukan.

3. Masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat dalam tulisan ini adalah sekelompok orang yang hidup dan melakukan inter-aksi antara satu dengan lainnya bertempat tinggal di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
4. Kewarisan adalah hal-hal yang terkait dengan ahli waris atau harta warisan
5. *Zaw al-arham* adalah seluruh orang yang memiliki hubungan darah (kekerabatan) dengan pewaris, namun tidak memiliki bagian tertentu dari harta waris dan bukan pula *'asabah*.

¹² *Ibid.*

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 242

E. Kerangka Teoritis

Hukum kewarisan adalah hukum yang berkaitan dengan pemindahan, baik berupa harta maupun hak, dari pihak pewaris kepada pihak ahli waris berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Persoalan kewarisan ini muncul apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang tidak terhalang untuk mewarisi.

Dalam konteks kewarisan persoalan pokok yang dibicarakan adalah bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Peralihan harta atas nama warisan ini bisa dalam bentuk perolehan sejumlah harta secara tertentu oleh ahli waris yang dinamakan *zawil furud* dan dapat pula berupa sisa harta yang disebut *'asabah*. Dalam hukum kewarisan Islam, selain kedua kelompok tersebut dikenal pula kelompok ahli waris *zaw al-arham*. Kelompok terakhir ini meskipun telah muncul sebagai wacana sejak masa Rasul namun hingga sekarang keberadaannya masih tetap diperdebatkan.

Perbedaan pendapat ulama tentang kewarisan *zaw al-arham* ini disebabkan karena tidak ditemukan satu ayat atau hadis sahih yang secara tegas berbicara tentang *zaw al-arham*. Dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, baik yang menerima maupun menolak keberadaan *zaw al-arham* kesemuanya bersifat *zanni*.

Dalam kajian usul fikih, dalil-dalil *zanni* biasanya masuk dalam lapangan ijtihad. Hal ini sejalan dengan apa yang dapat ditangkap dari dialog antara Nabi Saw. dengan Mu'az bin Jabal yang menyatakan bahwa ia (Mu'az) akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan dalil yang tegas

dari Alquran dan hadis.¹⁴

Tidak terdapatnya penjelasan hukum dalam Alquran dan hadis itu dapat dilihat dari dua segi :¹⁵

1. Alquran dan hadis secara jelas dan langsung tidak menetapkannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagian. Umpamanya hukum menghimpun dan membukukan Alquran dalam satu mushaf.
2. Secara jelas, langsung dan menyeluruh memang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran dan hadis, namun secara tidak langsung atau bagiannya ada penjelasannya. Umpamanya hukum memukul orang tua, tetapi ada penjelasan mengenai larangan mengucapkan kata-kata kasar (uf) terhadap orang tua.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa ijtihad itu berlaku dalam masalah-masalah yang belum ada nasnya, juga berlaku dalam masalah yang telah ada nasnya namun belum pasti untuk masalah itu. Ketidak pastian itu

¹⁴ Redaksi lengkap hadis tersebut ialah :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ
قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُرُّ. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ
-صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا
يُرْضَى رَسُولُ اللَّهِ ». (رواه أبو داود)

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 287.

dapat pula dilihat dari segi keberadaannya sebagai dalil (*wurudnya*) dan dapat pula segi tunjukannya (*dilalahnya*). Umpamanya hadis Nabi tentang *zaw al-arham* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berasal dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad. Hadis ini adalah hadis ahad yang dari segi *wurudnya zanni*, namun dari segi *dilalahnya* (penunjukannya terhadap hukum) adalah *qat'i*, sehingga apabila dapat diterima kebenarannya berasal dari Nabi, maka kewarisan paman dari jalur ibu tidak dapat ditetapkan lain selain dari yang ditetapkan dalam hadis tersebut. Namun karena *wurudnya* bersifat *zanni*, maka timbul perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagai hukum.

Menurut ulama usul fikih, sebuah dalil *zanni*, apalagi didukung oleh dalil-dalil umum lainnya, dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum selama belum ditemukan dalil lain yang lebih kuat membatalkannya. Demikian halnya dengan dalil yang berbicara tentang *zaw al-arham* ini. Sebagian besar dalil yang bersumber dari Alquran tentang *zaw al-arham* bersifat *zanni dilalah* dan hadis yang berbicara tentang hal tersebut juga bersifat *zanni*. Oleh karena itu, menurut penulis sebaiknya institusi *zaw al-arham* ini diletakkan dalam kerangka *masalah mursalah* untuk kemudian dicari dalil-dalil yang dapat menegaskan keberadaan *zaw al-arham* termasuk dalil-dalil pendukung yang salah satunya berasal dari perasaan hukum masyarakat, apa yang lebih mendekati keadilan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena hukum kewarisan masuk dalam bidang hukum sosiologis, yaitu hukum yang berbicara tentang inter aksi masyarakat melalui peralihan harta atau hak. Penelitian terhadap pandangan atau perasaan hukum masyarakat tentang

zaw al-arham ini menjadi sangat penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang diproyeksikan menjadi Undang-undang.

Mochtar memandang hukum dalam arti luas tidak saja dilihat dari segi normatif, akan tetapi hukum juga dirasakan sebagai gejala sosial atau empiris. Hal ini terlihat dari definisi yang diberikannya yaitu :

“Jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institusi) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan secara menyeluruh.”¹⁶

Dari batasan hukum yang diberikan Mochtar di atas terlihat bahwa kata asas-asas dan kaidah-kaidah menunjukkan hukum dalam arti gejala normatif, sedangkan kata lembaga-lembaga dan proses-proses menunjukkan hukum dalam arti gejala sosial atau empiris. Mochtar mengakui bahwa pandangannya ini diilhami oleh konsep dan fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam pandangan Pound hukum merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai pembaruan masyarakat (*a tool of social engineering*). Aliran ini dikenal dengan *pragmatical legal realism*.¹⁷

Disamping itu, ia juga menggunakan konsep *sociological*

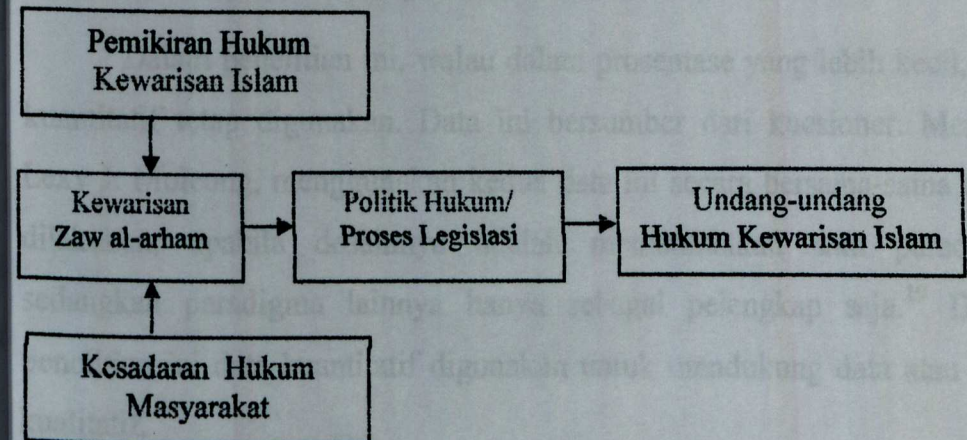
¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1995), hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*

jurisprudence dari Eugen Ehrlich, dimana hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* sebagai *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.¹⁸ Oleh karena itu hal yang penting dalam suatu konsep adalah adanya keseimbangan untuk mengadakan pembaruan melalui perundang-undangan di satu pihak, dan kesadaran untuk memperhatikan nilai-nilai dalam kenyataan yang hidup di masyarakat di pihak lain.

Akhirnya yang terpenting dari kesemua ini ialah bagaimana suatu aturan dapat memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat melalui kepastian hukum yang didasarkan pada nilai-nilai normatif dan empiris sekaligus. Untuk itu tidak berlebihan kiranya apabila penelitian ini atau sejenisnya dijadikan acuan dalam proses legislasi hukum oleh para wakil rakyat atau pemerintah guna mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka pemikiran dalam ruang lingkup penulisan penelitian ini dapat disederhanakan melalui diagram di bawah ini :



¹⁸ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 70 – 71.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian tentang pandangan hukum masyarakat terhadap hak kewarisan *zaw al-arham* ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk memberikan bobot yang lebih pada metode ini, maka data dan fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Sejalan dengan sifat penelitian deskriptif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh data kualitatif, yaitu suatu data yang tidak dinalisa dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik. Seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan, dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan menginterpretasikan sejumlah data atau fakta yang ada, dan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif.

Dalam penelitian ini, walau dalam prosentase yang lebih kecil, data kuantitatif tetap digunakan. Data ini bersumber dari kuesioner. Menurut Lexy J. Moleong, menggunakan kedua data ini secara bersama-sama dapat dilakukan, apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap saja.¹⁹ Dalam penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk mendukung data atau fakta kualitatif.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 5.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, pertama data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum kewarisan *zaw al-arham* dan sistem kewarisannya. Kedua adalah data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data yang terakhir ini mencakup dua komponen data, yaitu lokasi penelitian dan responden.

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kota Medan tepatnya di Kecamatan Medan Barat. Kecamatan ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan. Selanjutnya, berdasarkan *purposive sampling*, dari 6 (enam) kelurahan yang ada ditentukan 30 (tiga puluh) orang sebagai responden. Penentuan ke tiga puluh orang tersebut sebagai responden didasarkan pada tingkat pengetahuan mereka tentang *zaw al-arham*, mulai dari mereka yang tidak mengenal *zaw al-arham*, sekedar mengenal *zaw al-arham* hingga yang memahami posisi *zaw al-arham* dalam susunan ahli waris.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan penelitian ilmiah. Secara teoritis ada empat macam alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara, dan kuesioner. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan semua alat pengumpul data tersebut.

4. Analisa Data

Setelah diperoleh data-data primer dan data-data sekunder, selanjutnya data-data tersebut diperiksa untuk mengetahui validitasnya.

Terhadap data primer diadakan pengelompokan sebagai berikut, yaitu dari tiga puluh responden yang terlibat dalam penelitian ini diadakan tabulasi mengenai data yang bersifat kuantitatif seperti tingkat pengetahuan dan seluruh jawaban yang sifatnya tertutup. Setelah masing-masing data kuantitatif dikelompokkan dan diolah selanjutnya dianalisa dengan menggunakan statistik analisa deskriptif, melalui rumus ;²⁰

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi

Sedangkan data yang bersifat kualitatif dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban, seperti apa alasan bapak/ibu mempertahankan/meniadakan *zaw al-arham*, mengapa bapak/ibu mendahulukan atau membelakangkan hak *baitul mal* dari *zaw al-arham*, mengapa bapak/ibu setuju/tidak setuju *zaw al-arham* diatur melalui sistem perundang-undangan di Indonesia. Setelah masing-masing data kualitatif dikelompokkan dan diolah, kemudian dianalisa secara induktif.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1989), hlm. 267 – 268.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG ZAW AL-ARHAM

A. Pengertian

Penggunaan istilah arham ini lebih populer disebut sebagai kerabat dari pihak ayah dan ibu, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 1 :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (النساء: 1)

“ dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan namaNYA kalian saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekerabatan “. (an – Nisa’:1)

pengertian arham dalam istilah ialah orang yang tidak termasuk mendapat harta warisan (tidak termasuk dalam golongan Ashabul Firudh dan Ashobah).²¹

B. Beberapa Pemikiran Tentang Kewarisan *Zaw al-Arham*

1. Kewarisan *Zaw al-Arham* Menurut Mazhab Sunni

Para imam mujtahid dari kalangan sunni berbeda pendapat dalam hal kewarisan *zaw al-arham*, sebagian mereka menyatakan bahwa *zaw al-arham* berhak menerima warisan sedangkan sebagian yang lain menyatakan tidak berhak. Dalam hal ini mereka terbagi kepada dua kelompok yaitu :

²¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Bandung : CV.Diponegoro, 1992), hlm. 200

- a. Imam Malik dan Syafi'i, mereka berpandangan bahwa *zaw al-arham* tidak berhak menerima harta warisan, karenanya harta warisan apabila tidak ada golongan *ashab al-furud* dan *'ashabah*, maka diserahkan kepada baitul mal dan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Tidak diperuntukkan secara khusus bagi golongan *zaw al-arham* saja.²² Di dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, mazhab Syafi'i disebutkan sebagai berikut :

وَالثَّالِثُ : أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ إِنَّمَا كَانَ أَحَقَّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ : لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ يَعْقِلُ عَنْهُ فَصَارَ مِيرَاثُهُ لَهُ ، فَلَمَّا كَانَ عَدَمُ بَيْتِ الْمَالِ يُسْقِطُ الْعَقْلَ عَنْهُ وَجَبَ أَنْ يُسْقِطَ الْمِيرَاثَ مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ ثَابِتًا وَكَانَ تَوْرِيثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمِ بَيْتِ الْمَالِ وَاجِبًا.²³

Artinya : Dan yang ketiga : Bahwa baitul mal sesungguhnya lebih berhak terhadap harta warisan daripada *zaw al-arham*, karena baitul mal bertanggung jawab terhadap pembayaran diyat – jika yang meninggal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas – maka ia berhak terhadap harta warisannya. Namun ketika tidak ada baitul mal gugurlah tanggung jawab membayar diyat tersebut daripadanya, dengan demikian gugur pula haknya memperoleh harta warisan. Apabila yang kami sebutkan itu terjadi, maka hak kewarisan *zaw al-arham* berlaku ketika tidak ada baitul mal.

32/LP/FT/03/2014

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 66. Al-Mawardi mengungkapkan sebagai berikut :

²³ Al-Mawardi, *Al-Hawi*, h. 219

Pendapat kedua Imam tersebut disandarkan kepada pendapat sebagian sahabat, seperti Zaid bin Tsabit, Ibn Abbas, dan Sa'id bin Musayyab.

Kelompok pertama ini mengemukakan argumen mereka bahwa ayat-ayat mawaris hanya menentukan hak-hak ahli waris *ashab al-furud* dan *'ashabah*. Allah tidak mengatur sama sekali kewarisan *zaw al-Arham* ini, padahal Allah SWT telah berfirman: (وما كان ربك نسيا) Tidaklah mungkin kalau Allah lupa akan sesuatu. Dengan demikian, menambahkan *zaw al-arham* sebagai ahli waris merupakan penciptaan syariat (*tasyri'*) yang merupakan hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya. Disamping itu pula Rasulullah SAW sendiri pada suatu saat pernah meminta petunjuk kepada Allah SWT perihal setatus ahli waris bibi sebelah bapak (*'ammah*), dan bibi sebelah Ibu (*khalah*), yang mana mereka itu tidak mendapat warisan, hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَجِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَاتِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا (رواه البيهقي)²⁴

Artinya : Dari 'Ata' bin Yasar : Bahwa Rasulullah SAW. menunggang kenderaannya ke Quba' untuk memohon petunjuk (kepada Allah) tentang hak kewarisan bibi dari pihak ayah dan bibi dari

²⁴ Abi Bakr Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid VI, h. 350.

pihak ibu kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa keduanya tidak berhak menerima warisan.

Hadis di atas secara tegas menetapkan bahwa ahli waris *zaw al-arham* ('ammah dan khalah) tidak berhak menerima warisan. Jadi tanpa membedakan kaum muslimin pada umumnya, menurut pandangan ini, mereka dapat memanfaatkan harta warisan tersebut melalui baitul mal, baik kaum muslimin yang memiliki hubungan darah dengan si mati maupun yang tidak.

- b. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ahli waris *zaw al-arham* berhak menerima warisan ketika tidak ada golongan *ashab al-furud* dan 'ashabah.²⁵ Menurut pandangan mereka, *zaw al-arham* lebih berhak menerima warisan dari pada yang lain, sebab mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mati. Oleh karenanya hak kewarisan mereka didahulukan dari pada baitul mal. Dalam kitab *al-mabsut*, salah satu kitab mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut :

بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّ الرَّدَّ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الرَّحِمِ وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ لَا رَحِمَ لَهُ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَمِنْ أَصْلَانَا أَنَّ الْمِيرَاثَ يُسْتَحَقُّ بِالرَّحِمِ ، وَأَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ يُقَدِّمُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ . فَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ فِيمَا بَقِيَ يُقَدِّمُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِالرَّحِمِ .²⁶

²⁵ Ash-Shabuni, *Hukum*, h. 201

²⁶ Syams ad-Din Abu Bakr Muhammad as-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), juz. XXIX, h. 167.

Artinya : Didasarkan pada persoalan zaw al-arham, maka sesungguhnya radd itu dipandang sah menurut hukum karena adanya hubungan rahim, oleh karenanya tidak boleh dilakukan radd pada orang yang tidak memiliki hubungan rahim, yaitu suami dan isteri, dan menurut hukum asal harta waris itu dimiliki karena hubungan rahim, dan sesungguhnya zaw al-arham itu diutamakan daripada baitul mal, maka demikian pula ashab al-furud diutamakan menerima sisa harta daripada baitul mal, karena hubungan rahim.

Pendapat kedua Imam tersebut disandarkan kepada pendapat Abu bakar, Umar bin Khattab, Usman, Ali, dan sahabat lainnya r.a. Rujukan mereka adalah pada firman Allah dalam surah al Anfal ayat 75, yang memberikan dalalah (petunjuk) umum yaitu :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
مِنْكُمْ ۚ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ

ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya : “ dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihadah bersamamu, maka orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat), di dalam kitabullah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat tersebut, keluarga dekatlah yang paling berhak menerima warisan baik yang tergabung dalam kelompok *ashab al-furud*

maupun 'asabah, namun apabila ahli waris yang dekat tidak ada, maka ahli waris yang jauh dapat menerimanya. Meskipun tidak secara rinci, ayat tersebut mengaturnya, hak-hak waris dari kerabat yang jauh tercakup dalam pengertian *al arham*, pada ayat di atas.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah riwayat Imam tarmizi dari Umar bi Khattab r.a, ketika pada suatu hari ia menerima surat dari Abu Ubaidah bin Jarrah yang menanyakan tentang siapa yang akan mewarisi harta Sahl bin Hunaif yang tewas terbunuh dan tidak mempunyai ahli waris selain dari saudara laki-laki ibu (khal). Atas pertanyaan tersebut sahabat Umar r.a, menjawab dengan kutipan hadis yang berbunyi :

« اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ » (الترمذی)²⁷

Artinya : “ Allah dan Rasul-Nya adalah wali dari mereka yang tak punya wali (tuan), dan khal (saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. (Riwayat Tarmizi).

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa khal (saudara laki-laki ibu) adalah ahli waris yang berhak menerima harta waris ketika ahli waris yang lebih dekat, yaitu *ashab al-furud* dan 'asabah, tidak ada. Penegasan ini memposisikan bahwa hubungan kewarisan *zaw al-arham* didahulukan daripada hubungan atas nama agama melalui baitul mal.

Jika dilihat dari berbagai pendapat ulama tentang *zaw al-arham* yang telah diutarakan di atas, maka dapat dilihat bahwa pendapat yang paling

²⁷ At-Tirmizi, *Al-Jami'*, h. 607

banyak diamalkan oleh sebagian besar para sahabat dekat Rasulullah Saw., dan merupakan pendapat zumhur sahabat dan tabi'in adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ulama hanafiah dan Hanabilah, karena pendapat ini kuat dalil-dalilnya, lebih jelas hujjah dan oriantasinya, lebih adil dan relevan dengan kenyataan.

Hal yang perlu menjadi perhatian dari pendapat yang di utarakan oleh Ulama Malikiah dan Syafi'iyah, yang lebih mengutamakan baitul mal dari pada *zaw al-arham*, yaitu mensyaratkan bahwa baitul mal yang dimaksud haruslah yang teratur dan adil, sedangkan pada masa setelah abad kedua hijriyah menurut mazhab Maliki dan abad keempat menurut mazhab Syafi'i,²⁸ dalam kenyataannya sulit menemukan baitul mal yang memenuhi persyaratan tersebut.

Dengan sulitnya menemukan baitul mal yang adil dan teratur, belakangan Ulama Malikiah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa *zaw al-arham* harus didahulukan dari pada baitul mal, ini disebabkan karena ketidakteraturan baitul mal tersebut, bahkan pendapat ini menjadi pegangan para mufti mereka, dengan alasan menjaga kemaslahatan. Dengan demikian pendapat ini sudah menjadi kesepakatan ulama fiqih, yaitu kebolehan *zaw al-arham* menerima harta waris yang di mulai dari abad kedua hijriyah sampai dengan sekarang.²⁹ Perubahan paradigma ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab mazhab Maliki dan Syafi'i diantaranya adalah kitab *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil*, mazhab Maliki sebagai berikut :

²⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 377.

²⁹ Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), jilid VI, h. 559

...فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِيرَاثُهُ لِذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِعَصَبَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَا مَوَالِي
وَالِإِلَى هَذَا رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنْ فُقَهَائِنَا ، وَمَشَايِخِنَا يَذْهَبُونَ فِي زَمَانِنَا هَذَا وَلَوْ أَدْرَكَ مَالُكَ
وَأَصْحَابُهُ مِثْلَ زَمَانِنَا هَذَا لَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ إِذَا انْفَرَدُوا وَالرُّدُّ عَلَى مَنْ يَجِبُ
لَهُ الرُّدُّ مِنْ أَهْلِ السَّهَامِ انْتَهَى.³⁰

Artinya : Maka wajib zaw al-arham menjadi ahli warisnya jika tidak ada 'asabah, yaitu apabila seseorang tidak memiliki 'asabah dan tidak pula tuan yang memerdekakannya. Inilah pendapat sebagian besar ahli fikih dan pimpinan mazhab kita. Pada zaman kita sekarang, seandainya Imam Malik ra. beserta para sahabatnya hidup pada masa kita sekarang ini niscaya ia menyerahkan harta warisan tersebut kepada zaw al-arham (bukan baitul mal), apabila hanya zaw al-arham yang ada, dan mengembalikan sisa harta kepada yang berhak diantara ashab al-furud.

Mengenai alasan mendahulukan zaw al-arham daripada baitul mal dalam mazhab Maliki adalah karena tidak teraturnya baitul mal tersebut pada masa mutaakhirin, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-syarh al-Kabir*, mazhab Maliki yaitu :

وَذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْبُخَيْرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَنْ عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ حُكِيَ اتِّفَاقُ
شُيُوخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرُّدُّ عَلَى ذَوِي السَّهَامِ لِعَدَمِ
إِنْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ.³¹

³⁰ Abdurrahman al-Magribi, *Mawahib*, h. 415

³¹ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah*, h. 559.

Artinya : Syekh Sulaiman al-Buhairi menyebutkan dalam kitab *Syarh al-Irsyad 'an 'uyun al-Masail* bahwa diceritakan telah ada kesepakatan para pimpinan mazhab setelah abad kedua hijriyah tentang hak kewarisan *zaw al-arham* dan radd kepada ashab al-furud karena tidak teraturnya baitul mal.

Dalam Mazhab Syafi'i, perubahan paradigma tentang kedudukan *zaw al-arham* ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab mazhab tersebut, diantaranya kitab *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Alfaz al-Minhaj*, dinyatakan sebagai berikut :

فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ ، بَلِ الْمَالُ لِبَيْتِ
الْمَالِ ، وَأُفْتِيَ الْمُتَأَخَّرُونَ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ غَيْرِ
الزَّوْجَيْنِ مَا فَضَلَ عَنْ فُرُوضِهِمْ بِالنِّسْبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَفَ إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَهُمْ
مَنْ سِوَى الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَقَارِبِ ، وَهُمْ عَشْرَةٌ أَصْنَافٍ أَبُو الْأُمِّ ، وَكُلُّ جَدٍّ وَجَدَّةٍ
سَاقِطَيْنِ ، وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ ، وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالنَّعَمُ
لِلْأُمِّ ، وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، وَالْمُدْلُونُ بِهِمْ.³²

Artinya : Menurut hukum asal dalam mazhab Syafi'i, *zaw al-arham* tidak berhak terhadap harta warisan dan tidak pula diraddkan kepada ashab al-furud, namun harta waris tersebut diserahkan kepada baitul mal. Ulama mazhab muta'akhirin memberi fatwa bahwa apabila baitul mal tidak teratur, maka dilaksanakan radd kepada

³² Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Alfaz al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009), jilid III, h. 9-10.

ashab al-furud selain suami isteri dari sisa bagian ashab al-furud. Jika ashab al-furud tidak ada, maka diserahkan kepada zaw al-arham dan mereka ini ada sepuluh kelompok, yaitu ; ayahnya ibu, kakek dan nenek gair as-shahih, anak-anak dari anak perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak saudara perempuan, anak-anak saudara seibu, paman seibu, anak-anak perempuan paman dan bibi, dan keturunan mereka.

Secara lebih tegas, kitab *fath al-Mu'in* menjelaskan sebagai berikut :

ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الارحام، ولا يرد على أهل الفرض

فيما إذا وجد بعضهم، بل المال لبيت المال، ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم

غير الزوجين بنسبة الفروض، ثم ذوي الارحام، وهم أحد عشر: ولد بنت، وأخت، وبنت

أخ، وعم وعم لام، وخال، وخالة، وعمة، وأبو أم، وأم أبي أم، وولد أخ لام.³³

Artinya : Seandainya ahli waris tidak ada secara keseluruhan, maka menurut hukum asal tidak diwarisi oleh zaw al-arham dan tidak pula dikembalikan kepada ashab al-furud, namun harta tersebut diserahkan kepada baitul mal. Kemudian apabila baitul mal tidak teratur, maka sisa harta dikembalikan kepada ashab al-furud selain dari suami isteri, kemudian baru zaw al-arham, dan mereka itu ada sebelas, yaitu anak laki-laki dari anak perempuan dan saudari, anak perempuan saudara, paman dari pihak ayah seibu, paman dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, ayah dari pihak ibu, ibu dari ayahnya ibu, dan anak laki-laki saudara seibu.

Adapun masa terjadinya perubahan paradigma itu dimulai pada abad ke empat hijriyah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab mazhab Syafi'i diantaranya kitab berikut ini :

³³ Zain ad-Din bin Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (al-Haramain, 2006), h. 95

(أَقْتَى الْمُتَأَخَّرُونَ) ... كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ ... (إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ) ...)

بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْفَرَضِ) ... (غَيْرِ) ... (الزَّوْجَيْنِ) ... (مَا فَضَلَ عَنْ فُرُوضِهِمْ بِالنِّسْبَةِ)

... (فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا) أَيِ ذَوُو الْفُرُوضِ (صُرِفَ) الْمَالُ (إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ)³⁴

Artinya : Berfatwa ulama muta'akhirin ... setelah abad keempat hijriyah...apabila baitul mal tidak teratur...maka berlaku radd kepada ashab al-furud ...selain...suami isteri...dari sisa harta setelah perolehan ashab al-furud menurut bagiannya masing-masing ... jika tidak ada ashab al-furud, maka harta waris diserahkan kepada zaw al-arham.

Para ulama sunni yang menerima konsep kewarisan zaw *al-arham* membuat klasifikasi terhadap kelompok ahli waris zaw *al-arham* tersebut ke dalam empat golongan, yaitu :³⁵

1. Orang yang menjadi keturunan orang yang meninggal melalui jalur kebawah, mereka itu adalah :
 - a. Cucu dari anak perempuan dan terus kebawah, baik laki-laki atau perempuan.
 - b. Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah, baik laki-laki atau perempuan

³⁴ Syam ad-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ibnu Syihab ad-Din ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jilid VI, h. 12.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2008), jilid VIII, h. 378-379. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1999), h. 307

2. orang yang menjadi asal keturunan orang yang meninggal dunia (jalur keatas), mereka adalah :
 - a. Kakek yang tidak shohih (tidak langsung) terus keatas, yaitu ayahnya ibu dan kakeknya ibu.
 - b. Nenek yang tidak shohih (tidak langsung), terus keatas yaitu ibu dari ayahnya ibu, dan ibu dari ibunya ayah.
3. Orang yang dinasabkan kepada kedua orang tua orang yang meninggal (kerabat jalur kesamping), mereka adalah :
 - a. Anak-anak dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu, baik laki-laki atau perempuan.
 - b. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah atau seibu dan anak-anak keturunan mereka terus kebawah.
 - c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan semua keturunannya seperti : cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara seibu atau cucu perempuan dari anak laki-laki saudara seibu.
4. Orang yang dinasabkan kepada kedua kakek atau kedua nenek orang yang meninggal dunia, baik dari jihad laki-laki atau jihad perempuan, mereka adalah :
 - a. Semua bibi dari pihak ayah orang yang meninggal (bibi sekandung, bibi seayah, bibi seibu), juga paman-paman dari pihak ibu orang yang meninggal, juga bibi dari pihak ibu orang yang meninggal dan demikian pula paman-pamannya ibu.

- b. Anak-anak bibi dari pihak ayah dan ibu, dan anak-anak paman ibu dari pihak bapaknya ibu terus kebawah.
- c. Bibi-bibi ayah orang yang meninggal dari pihak ayahnya, baik sekandung seayah atau seibu, paman-pamannya ibu dari bapaknya ibu, dan bibi-bibinya ibu dari bapaknya ibu, juga Khal dari ibu dan Khalah dari ibu, baik sekandung atau seayah.
- d. Anak-anak dari golongan C dan terus kebawah, seperti anak laki-laki dari bibinya ayah dan anak perempuan dari bibinya ayah dan seterusnya.
- e. Paman kakek orang yang meninggal dari pihak ibu, paman nenek mayit dari pihak bapak, paman-paman dan bibi-bibi nenek dari pihak ibu dan bibi-bibinya kekek atau nenek dari pihak ibu.
- f. Anak-anak golongan yang e kebawah.

Para ulama sunni juga menetapkan dua syarat kepada *zaw al-arham* untuk tampil sebagai ahli waris, yaitu :³⁶

- 1 Harus tidak ada *ashab al-furud*, karena jika ada *ashab al-furud*, maka ia mengambil bagiannya sebagai *ashab al-furud* dan sisanya diserahkan kepada *ashab al-furud* dengan jalan *radd*, perolehan dengan jalan *radd* dilakukan sebelum berlaku hak kewarisan *zaw al-arham*.
- 2 Harus tidak ada orang yang mendapat bagian '*ashabah*'. Kerena jika ada orang yang mendapat bagian '*ashabah*', maka dengan sendirinya ia mengambil semua harta pusaka bila sendirian, dan mengambil sisanya

³⁶ *Ibid.*, Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, al-Ma'arif, Bandung, 1975, h.

bila ada *ashab al-furud* bersama mereka. Tetapi bila ahli warisnya itu hanya salah seorang suami atau isteri, maka bagi salah satu dari keduanya mengambil bagiannya sebagai *ashab al-furud*. Sedangkan sisanya diserahkan pada *zaw al-arham*, karena *radd* kepada salah seorang suami atau isteri dilaksanakan ketika tidak ada *zaw al-arham*.

Selain perbedaan pendapat tentang berhak atau tidaknya *zaw al-arham* menerima harta warisan, para ulama sunni juga berbeda pendapat tentang metode atau tata cara pembagian kewarisan *zaw al-arham*, mereka ini terbagi kepada tiga golongan, yaitu :

1. Golongan *Ahlu al-Rahmi*
 2. Golongan *Ahlu al-Tanzil*
 3. Golongan *Ahlu al-Qarabah*.³⁷
1. Golongan *Ahlu al-Rahmi*

Mazhab ini didukung oleh Hasan bin Muyassar dan Nuh bin Zirrah. Golongan ini dinamakan *Ahlu al-rahmi* karena menurut mereka pembagian kepada semua ahli waris *zaw al-arham* ini disama ratakan, tanpa melihat dekatnya hubungan kekerabatan dengan pewaris serta tanpa membedakan jenis kelaminnya, baik laki-laki atau perempuan, sama bagiannya dalam hal penerimaan harta waris. Mereka beralasan karena sebab kewarisan *zaw al-arham* adalah adanya hubungan kekerabatan yang mencakup keseluruhan.

Pendapat golongan ini tidak masyhur bahkan ada yang mengatakannya *dha'if*, karena argumentasi yang mereka gunakan sangat

³⁷ *Ibid.*, h. 358. Lihat juga Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 381-383. lihat juga T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, h. 229 - 231

bertentangan dengan kaidah syari'ah yang masyhur dalam ilmu mawaris seperti kaidah *hajib-mahjub* pada hubungan kekerabatan, disebabkan oleh hal ini makanya tidak satupun dari iman mujtahid yang mengikuti pendapat ini.

2. Golongan *Ahlu al-tanzil*

Golongan ini dinamakan *ahlu al-tanzil* karena mereka mendudukan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris yang ada diatasnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat kepada ahli waris yang menjadi penghubung antara ahli waris yang masih hidup dengan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185, cara ini dikenal dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*).

Dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* dijelaskan sebagai berikut :

...وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ مَذْهَبَانِ : مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْزِلَ كُلُّ فَرْعٍ مِّنْزِلَةَ أَصْلِهِ
الَّذِي يُدْلِي بِهِ إِلَى الْمَيِّتِ ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ وَهُوَ تَوْرِيثُ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَالْعَصَبَاتِ
، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ ، وَالْمَذْهَبَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ مَنْ انْفَرَدَ مِنْهُنَّ حَازَ جَمِيعَ الْمَالِ ذَكَرًا
كَانَ أَوْ أُنْثَى.³⁸

Artinya : ... dan dalam hal tatacara kewarisan mereka (*zaw al-arham*) terdapat dua pendapat, pertama mazhab *ahli tanzil*, yaitu setiap orang menempati posisi orang yang menghubungkan ia dengan pewaris. Kedua mazhab *ahli qarabah*, yaitu ahli waris yang lebih

³⁸ Asy-Syarbini, *Mugni*, jilid III, h. 13.

dekat kedudukannya dengan pewaris muncul sebagai ahli waris, mereka ini sama halnya dengan 'asabah, dan yang pertama itulah (*ahli tanzil*) yang sah (dalam mazhab Syafi'i). Kedua mazhab sepakat bahwa apabila zaw al-arham hanya sendirian, maka ia menghabiskan seluruh harta baik laki-laki maupun perempuan.

Dikecualikan dari kaedah penggantian tempat ahli waris ini, apabila penggantian tempat itu terjadi menyamping, paman dan bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu. Demikian pula paman dan bibi dari pihak ayah menempati posisi ayah. Oleh karenanya apabila seseorang meninggal, meninggalkan seorang bibi dari pihak ibu dan seorang bibi dari pihak ayah, maka untuk bibi dari pihak ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ harta waris dan bibi dari pihak ayah memperoleh sisanya atau $\frac{2}{3}$ harta waris. Dalam hal ini seolah-oleh pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu dan ayah.³⁹ Metode pembagian seperti ini diterapkan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki.

Berbeda dengan kedua mazhab di atas, menurut mazhab Hanbali, walaupun mereka mendukung metode penggantian tempat ahli waris, namun mereka tidak membedakan kadar perolehan dari masing-masing ahli waris yang sederajat. laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan perempuan. Sebagai contoh apabila seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan perempuan bibi, maka mereka memperoleh bagian yang sama, yaitu setengah untuk laki-laki dan setengah untuk perempuan. Dalam kitan al-iqna' dijelaskan sebagai berikut :

باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم ... ويورثون بالتتريل وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أولى به فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الأخوة

³⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, jilid VIII, h. 381

والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيتهم وولد الأخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمة والعمة من الأم كالأب وأبو أم أب و أبو أم أم وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمثلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فان انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وأن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم.⁴⁰

Artinya : Bab *zaw al-arham* dan tatacara kewarisan mereka ...dan mereka mewarisi dengan cara *tanzil*, yaitu menjadikan setiap orang menempati posisi ahli waris yang ada diatasnya, maka anak laki-laki dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari cucu perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan seperti ibu mereka. Anak perempuan saudara laki-laki dan paman kandung atau seayah dan anak perempuan dari anak-anak mereka, anak laki-laki saudara laki-laki seibu seperti orang tua mereka. Paman dan bibi dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu seperti ibu. Paman dan bibi seibu seperti ayah. Datuk dari ibunya ayah dan datuk dari ibunya ibu, saudara laki-laki dan perempuan mereka serta ibu dari ayah kakek menempati posisi mereka (ayah atau ibu). Kemudian dijadikan bagian setiap ahli waris berdasarkan bagian orang yang menghubungkannya, jika ahli waris *zaw al-arham* itu sendirian maka ia menghabiskan seluruh harta dan jika ada beberapa orang ahli waris *zaw al-arham* yang sama kedudukannya, maka mereka memperoleh bagian yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Para Ulama yang berpendapat seperti hal diatas adalah : Alqainah, Asysya'bi, Masruk, Abu Nu'ain, Abu Ubaidah, Nu'aim bin Humad, Al Hasan bin Ziyad, Syafi'iyah, Imam Ahmad dan Malikiyah.

⁴⁰ Syarf ad-Din Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim, *Al-Iqna' li Talib al-Intifa'*, (Riyad : Dar al-Muluk Abd al-Aziz, 1423 H), jilid III, h. 215.

3. Golongan *Ahlu al-qarabah*

Pendapat yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan menjadi pegangan Ulama Hanafiyah ini menganalisis kewarisan *zaw al-arham* kepada kedekatan derajat kekerabatan, kemudian kepada kuatnya hubungan kerabat, yang diqiaskan pada golongan *'asabah* yang menetapkan orang yang berhak itu adalah laki-laki yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya. Dalam kitab *ad-Dur al-mukhtar*, mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut :

بَابُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ (هُوَ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ) فَهُوَ قِسْمٌ ثَالِثٌ
حَيْثُ يُرِثُ مَعَ ذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ سِوَى الزَّوْجَيْنِ (لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا) فَيَأْخُذُ
الْمُنْفَرِدُ جَمِيعَ الْمَالِ (بِالْقَرَابَةِ) وَيَحْجُبُ أَقْرَبُهُمُ الْأَبْعَدَ (كَتَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ فَهُنَّ أَرْبَعَةٌ
أَصْنَافٍ جُزْءُ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ أَصْلُهُ ثُمَّ جُزْءُ أَبَوَيْهِ ثُمَّ جُزْءُ جَدَّتَيْهِ أَوْ جَدَّتَيْهِ (وَ) حَيْثُ يُقَدَّمُ
(جُزْءُ الْمَيِّتِ وَهُمْ) أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الْإِبْنِ (وَإِنْ سَقَلُوا⁴¹ .

Artinya : Artinya : Bab kewarisan *zaw al-arham*, yaitu seluruh kerabat yang tidak memiliki hak waris secara tertentu dan bukan pula *'asabah*. *Zaw al-arham* ini adalah kelompok ketiga, dia tidak mewarisi bersama *ashab al-furud* dan *'asabah* kecuali bersama suami isteri, karena suami isteri tidak berhak menerima radd. *Zaw al-arham* menghabisi seluruh harta waris meskipun sendirian, dari jalur kerabat, dan kerabat yang dekat menghabisi kerabat yang jauh sebagaimana urutan *'asabah*, mereka itu ada empat kelompok, yaitu anak keturunan mayit, orang tua mayit, kemudian anak

⁴¹ Muhammad bin Ali bin Abd ar-Rahman al-Hanafi, *Ad-Dur al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 768.

keturunan kedua orang tua mayit, kemudian anak keturunan kakek nenek mayit. Ketika mereka semua ada, maka yang diutamakan adalah anak keturunan mayit, mereka itu adalah anak laki-laki dari anak perempuan dan anak laki-laki dari cucu perempuan, terus ke bawah.

Sebagaimana disebutkan di atas, Mazhab ini mengelompokkan *zaw al-arham* kepada empat kelompok sesuai dengan kedekatannya kepada pewaris, yaitu :⁴²

- Kelompok cucu pewaris dan keturunannya yang dihubungkan melalui garis perempuan
- Kelompok Kakek ghairu shahih dan nenek ghairu shahih
- Kelompok anak turunan saudari-saudari
- Kelompok anak turunan paman dan bibi

Konsekwensi dari pengelompokan ini adalah bahwa kelompok ahli waris yang lebih jauh terhalang untuk memperoleh harta warisan karena terdinding oleh ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, walaupun ia hanya seorang diri. Apabila ahli waris yang sederajat lebih dari seorang, dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki memperoleh dua bagian perempuan.⁴³

⁴² Ibid., Lihat juga Sabiq, *Fiqh*, h. 307-308

⁴³ Dalam kitab Al-Mabsut dinyatakan sebagai berikut :

وَأِنْ كَانَ مَعَهَا ذَكَرٌ فِي ذَرْجَتِهَا ، وَهُوَ ابْنُ الْإِثْنَةِ فَالْمَالُ يَنْتَهَمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ هَذَا كُلُّهُ بَيَانُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ

Artinya : Apabila bersama ahli waris perempuan itu ada seorang laki-laki yang sederajat dengannya, yaitu anak laki-laki dari anak perempuan, maka harta waris dibagi diantara mereka berdua dengan cara laki-laki memperoleh dua bagian perempuan.

2. Kewarisan *Zaw al-Arham* Menurut Syi'ah

Sistem kewarisan yang dirumuskan ulama Syi'ah menolak pembagian ahli waris ke dalam '*ashabah* dan *zaw al-arhâm* seperti yang dirumuskan ulama Sunni.⁴⁴ Mereka menggunakan istilah *zâw al-qarâbah* untuk kedua jenis kelompok tersebut. *zâw al-qarâbah* mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan (laki-laki dan perempuan). Pembagian ini muncul karena pandangan Syi'ah yang menolak pemaknaan anak

Inilah cara yang ditempuh ahli qarabah. Lihat As-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, juz.XXX, h. 10. Lihat juga Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h. 384.

⁴⁴ Syi'ah Imamiyah mengingkari hadis tentang 'asabah yang diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Thawus dari Ibnu Abbas, yaitu :

« أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ »

Artinya : Berikanlah harta waris tersebut kepada orang yang berhak menerimanya menurut bagian yang telah ditentukan. Adapun sisanya menjadi hak dari orang laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya kepada pewaris.

Menurut penelitian Syi'ah terdapat kejanggalan dalam sanad hadis ini. Ibnu Abbas sendiri mengingkarinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Qaribah bin Mudrab sebagai berikut, "Aku bertanya, banyak orang meriwayatkan darimu dan dari Thawus bahwa bagian warisan yang tersisa setelah diambil oleh ashab al-furud diperuntukkan bagi orang laki-laki terdekat. Beliau menjawab, "Apakah kamu dari penduduk Iraq ?" Aku menjawab, "ya." Lalu beliau meneruskan perkataannya, "sampaikanlah kepada mereka bahwa aku mengatakan apa yang difirmankan Allah SWT.

"Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu" (QS. An-Nisa' : 11). Dan firman Allah ; "Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah" (QS. An-Anfal : 75). Apakah kedua ayat ini menyisakan sesuatu ?. Aku sama sekali tidak mengatakan hadis itu tidak pula Thawus meriwayatkannya. Kemudian Qaribah mengatakan, "Lalu aku menemui Thawus" dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak meriwayatkan hadis ini." Padahal hadis tersebut tidak datang kecuali dari Thawus". Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Al-Miras 'inda al-Ja'fariyah*, terj. Burhan Wirasubrata, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta : Lantera, 2001), h. 123.

(*walad*) yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 176⁴⁵ dalam garis keturunan laki-laki semata seperti yang dilakukan ulama Sunni.⁴⁶ Bagi mereka anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan baik dari garis laki-laki maupun perempuan.⁴⁷ Pandangan ini berimplikasi pada pengelompokan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni, yaitu:⁴⁸

- a. Orang tua (ayah dan ibu) serta semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke hawah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan).
- b. Kakek dan nenek terus ke atas dari semua jalur, dan saudara serta saudari (anak-anak dari kedua orang tua beserta anak keturunan mereka).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ آمُرُوا هَٰلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ

أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ ... ﴿١٧٦﴾

Artinya : mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.

⁴⁶ Dalam bidang waris, ulama Sunni memberikan pemaknaan *walad* kepada anak laki-laki saja, oleh karena itu apabila seseorang meninggal, meninggalkan seorang anak atau beberapa anak perempuan, mereka tidak dapat menghabiskan harta kecuali dengan jalan radd, dimana tidak ada ahli waris yang lain selain mereka. Hal ini dapat dilihat dalam kasus 'asabah ma'al gair. Sebagai contoh ; seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris :

1.3 orang anak perempuan

2.2 orang saudara perempuan kandung

Menurut ulama Sunni, 3 orang anak perempuan memperoleh 2/3 dan sisanya (1/3) diserahkan kepada 2 orang saudara perempuan kandung sebagai 'asabah.

⁴⁷ Wirasubrata, *Hukum*, h. 103-104

⁴⁸ *Ibid.*, h. 130. Lihat juga Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B.et.al, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2012), h. 555-556.

- c. Paman dan bibi dari semua jalur beserta anak keturunan mereka masing-masing.

Pembagian dalam ketiga kelompok ahli waris ini merupakan sesuatu yang alami. Orang tua dan anak ditempatkan pada peringkat pertama sebab tidak ada perantara yang memisahkan mayit dari kedua orangtua dan anaknya. Sesudah mereka, secara langsung, adalah para saudara dan kakek-nenek, yang mana orang-orang ini memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit melalui satu perantara, yaitu ayah dan ibu, yang dengan demikian mereka ditempatkan pada peringkat ke dua. Sesudah itu adalah peringkat para paman dan bibi dari jalur ayah maupun ibu, sebab orang-orang ini memiliki hubungan dengan mayit melalui dua perantara, yaitu kakek dan nenek serta ayah dan ibu, yang dengan demikian mereka ditempatkan pada peringkat ke tiga.

Konsekwensi dari pengelompokan ini, selama ada seorang ahli waris pada tingkatan yang lebih tinggi, maka ia akan menghalangi ahli waris lainnya yang berada pada tingkatan yang lebih rendah untuk memperoleh warisan.

Ulama Syi'ah membagi ahli waris dari segi sebab pewarisannya kepada dua bagian: pewarisan *nasabiyah* (hubungan darah) dan pewarisan karena *sababiyah*.⁴⁹ Ahli waris *nasabiyah* terdiri atas dua golongan, yaitu :

- a. *Zâw al-furûd* yaitu, ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam al-Qur'an seperti saudara perempuan, ibu, dan istri.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 99. lihat juga Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 88.

- b. *Zâw al-qarâbah* yaitu, ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil *zâw al-furûd*, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris *sababiyah* juga terdiri dari dua golongan, yaitu :

- a. *Zaujiyah* (perkawinan).
b. *Wala'* (hubungan hukum karena memerdekakan budak)

Hukum kewarisan Syi'ah menganut asas bilateral, oleh karena itu menurut pandangan ulama Syi'ah, *zaw alarhâm* sama sekali tidak dikenal dalam ajaran Syi'ah. Laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka sama sebagai kerabat (*zâw al-qarâbah*). Seorang cucu perempuan atau laki-laki dari seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki (*bint/ibn al-ibn*) sederajat menurut pandangan Syi'ah. Keturunan dari anak perempuan tidak terhalang (*mahjûb*) oleh keturunan laki-laki. Hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ayat di atas menunjukkan adanya kesamaan kedudukan antara laki-

laki dan perempuan dalam hal mendapatkan harta pusaka. Sebab, ayat tersebut dengan jelas menyatakan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian.

Golongan syi'ah juga berpendapat jika si-pewaris mempunyai anak perempuan seorang atau lebih tetapi tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya meninggalkan saudara laki-laki, dalam hal ini harta pusaka sepenuhnya menjadi milik anak perempuan seorang atau lebih, saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.⁵⁰ Mereka mendasarkan pendapatnya ini kepada firman Allah SWT dalam surat al ahzab ayat 6:

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... ﴿٦﴾

Artinya: ...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah....

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa kerabat terdekat lebih berhak mewarisi daripada kerabat lain (yang lebih jauh), oleh karena itu menurut mereka dalam kasus ini anak perempuan lebih berhak daripada saudara laki-laki pewaris karena derajatnya lebih dekat dengan sipewaris. Selain itu juga jika anak laki-laki dapat menghibab saudara laki-laki, maka seharusnya anak perempuan juga dapat menghibab saudara pewaris yang laki-laki. karena dalam memahami lafadz "*walad*" harus diartikan anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa perbedaan. Sebab, lafadznya sendiri *mustaq* (bersumber) dari "*al-wilâdah*" yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an sendiri telah memakai lafadz tersebut dalam surat an-

⁵⁰ Wirasubrata, *Hukum*, h. 128-129

Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....

Dalam menafsirkan makna *walad*, ulama Sunni mengartikannya sebatas anak laki-laki, dan keturunan dari anak laki-laki selama belum melalui perempuan. Sedangkan menurut Syi'ah selama seseorang menjadi keturunan dari anak pewaris, baik melalui anak laki-laki maupun perempuan, tetap masuk dalam kategori *walad*.⁵¹ Adanya perbedaan penafsiran tersebut, berakibat berbedanya pengaruh *walad* terhadap ahli waris lainnya. Misalnya pewaris meninggalkan istri, cucu laki-laki dari jalur perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Menurut Sunni karena cucu laki-laki dari jalur perempuan, maka ia tidak masuk kategori *walad*, melainkan termasuk *zaw al-arhâm*. Ia tidak berhak mendapat bagian warisan dan tidak mempengaruhi posisi istri dalam mendapatkan bagian 1/4, serta tidak menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Syi'ah, karena cucu laki-laki dari jalur perempuan tersebut masuk dalam kategori *walad*, maka ia mempengaruhi bagian istri dari 1/4 menjadi 1/8, dan dapat menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan. Dalam hal ini seluruh sisa harta, setelah pembagian kepada isteri, menjadi milik cucu laki-laki jalur perempuan tersebut.

⁵¹ *Ibid.*, h. 104.

3. Kewarisan *Zaw al-Arham* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebelum bicara tentang eksistensi *zaw al-arham* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada baiknya diurai sedikit tentang kewarisan dalam KHI. Dijelaskan bahwa kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu : Pertama, adanya pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, adanya ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, adanya harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁵²

Dasar hukum kewarisan dalam KHI dinukil dari surat an-Nisa ayat 7-14, 33, 34 dan 176, surat al-Baqarah ayat 233, dan surat al-Ahzab ayat 6, dan Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Hal ini dicantumkan pada pasal 172 sebagai berikut :

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁵³

⁵² *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 ayat b, c, d, dan e.

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 172

Setelah pewaris meninggal, sebelum harta waris dibagi diantara para ahli waris, ahli waris memiliki beberapa kewajiban, yaitu :

- a. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah.
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

Hal di atas sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 175.

Hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris adalah sebagaimana disebutkan pada pasal 173, yaitu apabila dengan putusan hakim :

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pembagian ahli waris didasarkan pada dua pengelompokan, sebagaimana tercantum pada pasal 174, yaitu:

- a. Berdasarkan hubungan darah, terdiri dari dua golongan, Pertama, golongan laki-laki ; ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Kedua, golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Apabila terjadi ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak ahli waris yang meninggal tersebut. Dalam KHI ahli waris pengganti di rumuskan dalam pasal 185 dengan redaksi sebagai berikut :

- (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu orang yang di hukum karena (a) di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sedereajat dengan yang diganti”.

Berdasarkan uraian tentang ahli waris di atas, maka ahli waris dalam KHI terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu ;

- (a) Kelompok ahli waris *zaw al-furud* (yang ditentukan bagiannya)
- (b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya (*'asabah*)

(c) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti.⁵⁴

Adanya konsep ahli waris pengganti dalam KHI merupakan konsep asas keadilan yang berimbang dikarenakan masalah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi masalah keadilan yang benar-benar harus menjadi perhatian. Sehingga perumusan ahli waris pengganti itu sangat beralasan, karena dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam lingkungan komunitas keluarga. Hal ini sekaligus dapat menutup kekecewaan dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi persaudaraan, diharapkan dapat melihara keutuhan dan hubungan harmoni dengan anggota keluarga.

Dilihat dari sistem kekeluargaan, KHI menganut sistem bilateral, yakni seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Asas ini secara tegas tercantum dalam pasal 174.⁵⁵ Melalui pasal ini, maka KHI telah meninggalkan konsep ahli waris *zaw al-arham*, karena konsep ini muncul dari asas kewarisan patrilineal. Selain itu dikenalnya sistem penggantian tempat ahli waris dalam KHI juga merupakan sebab lain ditinggalkannya konsep ahli waris *zaw al-arham* tersebut.

⁵⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2010, h. 166-168.

⁵⁵ Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Meskipun KHI masih menggunakan istilah 'asabah, melalui pasal 193, suatu istilah yang digunakan oleh doktrin mazhab Sunni, tetapi KHI telah meninggalkan sebagian konsep-konsep kewarisan mazhab Sunni, terutama yang mengarah kepada konsep kewarisan patrilineal. Contohnya adalah dikenalnya penggantian tempat ahli waris dalam KHI.

Perlu dicatat di sini bahwa meskipun sistem *ahlu at-tanzil* dalam konsep ahli waris *zaw al-arham* memiliki kemiripan dengan penggantian tempat, tetapi kemiripan itu hanya dalam lingkup yang sangat terbatas. Sebab ahli waris *zaw al-arham* merupakan ahli waris yang ditarik dari garis orang atau keturunan perempuan, sementara penarikan garis keturunan dari satu sisi itu tidak dikenal dalam penggantian tempat ahli waris. Oleh karena itu dalam KHI penggantian tempat ahli waris tersebut berlaku baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan kekuatan hukum keduanya. Sedangkan menurut sistem kewarisan *zaw al-arham* penggantian tempat tersebut hanya terjadi apabila tidak ditemui garis keturunan laki-laki atau tidak ada ashab al-furud dan 'asabah.

Contoh seseorang meninggal, meninggalkan dua orang cucu (A dan B) dari dua orang anak pewaris (C dan D) yang telah meninggal terlebih dahulu. A adalah cucu perempuan dari anak perempuan pewaris dan B adalah cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris. Menurut konsep kewarisan KHI kedua cucu perempuan ini berhak memperoleh harta warisan sebesar yang seyogianya diterima oleh orang tua mereka masing-masing, sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan menurut konsep kewarisan *zaw al-arham* cucu perempuan dari keturunan perempuan tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh kakeknya. Seluruh harta waris menjadi hak

dari cucu perempuan garis keturunan laki-laki. 1/2 dari harta waris ia terima sebagai *ashab al-furud* dan 1/2 lagi melalui sistem *radd*, karena menurut sistem kewarisan sunni *radd* didahulukan dari *zaw al-arham*.

Jelasnya, tidak diaturnya baik kedudukan maupun besarnya bagian warisan ahli waris *zaw al-arham* di dalam KHI, karena KHI memang tidak menghendaki konsep-konsep seperti ahli waris *zaw al-arham* yang merupakan ajaran kewarisan patrilineal. KHI telah membawa pembaruan-pembaruan yang kalau dicermati jelas mengarah ke ajaran kewarisan bilateral.

Sebagai contoh, dalam pasal 209 KHI, disebutkan:

- Sebelah umur berakut dengan keturunan laki-laki
- Sebelah barai berakut dengan keturunan laki-laki
- Sebelah umur berakut dengan keturunan laki-laki
- Sebelah umur berakut dengan keturunan laki-laki
- Menurut wilayah, Kecamatan Medan Barat, di bagian 6 (enam)

Adapun, yaitu:

1. Kelurahan Pulo Bayan Kota
2. Kelurahan Grogol Kota
3. Kelurahan Kertawin
4. Kelurahan Silalahi
5. Kelurahan Sei Agil
6. Kelurahan Karang Benua

Ditulis dan ditandatangani, Kecamatan Medan Barat, berpenduduk

BAB III

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWARISAN ZAW AL-ARHAM

A. Profil Kecamatan Medan Barat

Kecamatan Medan Barat yang merupakan lokasi penelitian ini adalah salah satu dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor camat Medan Barat daerah ini memiliki wilayah seluas 539 hektar dan termasuk daerah lingkaran dalam kota medan dengan batas daerah sebagai berikut : ⁵⁶

- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Medan Deli
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Medan Petisah
- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Medan Helvetia
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Timur

Menurut wilayah, Kecamatan Medan Barat ini terbagi atas 6 (enam)

kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Pulo Brayan Kota
2. Kelurahan Glugur Kota
3. Kelurahan Kesawan
4. Kelurahan Silalas
5. Kelurahan Sei Agul
6. Kelurahan Karang Berombak

Dilihat dari sisi populasi, Kecamatan Medan Barat berpenduduk

⁵⁶ Data Kantor Camat Medan Barat Tahun 2011

111,756 jiwa dengan klasifikasi sebagai berikut : ⁵⁷

1. Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
55,725	56,031	111,756

2. Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah	Prosentase
01	Islam	57,254	51,3 %
02	Protestan	15,900	14,2 %
03	Katholik	4,846	04,3 %
04	Hindu	2,239	02,0 %
05	Budha	31,517	28,2 %
06	Total	111,756	100 %

B. Karakteristik Responden

Berdasarkan metode *purposive sampling*, responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang beragama Islam dengan karakteristik 10 (sepuluh) orang tidak mengenal *zaw al-arham*, 10 (sepuluh) orang mengenal *zaw al-arham*, dan 10 (sepuluh) orang terakhir paham mengenai sistem kewarisan *zaw al-arham*.

Responden yang kenal, tidak kenal, atau paham tentang *zaw al-arham* segera diketahui ketika kuesioner diedarkan atau wawancara dimulai. Penentuan responden yang bervariasi berguna untuk mengetahui apakah ada perbedaan jawaban yang signifikan antara mereka yang tidak mengenal, mengenal, dan paham tentang *zaw al-arham*.

⁵⁷ Ibid.

C. Kewarisan *Zaw al-arham* Dalam Pandangan Hukum Masyarakat

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam sistem kewarisan menurut hukum Islam *zaw al-arham* adalah suatu kasus yang bisa terjadi walaupun secara kuantitas ia jarang ditemukan. Dalam suatu negara yang menuntut adanya kepastian hukum, seperti Indonesia, jaranganya kasus *zaw al-arham* terjadi tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan aturan tentang kasus tersebut. Karena ketika ia terjadi dan menuntut penyelesaian secara hukum tidak bisa tidak penyelesaian itu harus diberikan.

Hingga kini aturan tentang *zaw al-arham* belum ditemukan dalam tata aturan hukum positif di Indonesia. Klausul yang mengatur hukum kewarisan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak satupun memuat aturan tentang *zaw al-arham*. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mengisi kekosongan hukum tentang *zaw al-arham* ini, antara lain adalah dengan meneliti pandangan hukum masyarakat terhadap fenomena *zaw al-arham*.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis didapati berbagai respon masyarakat tentang *zaw al-arham* diantaranya ; menurut 73 % responden, *zaw al-arham* berhak mewarisi harta peninggalan pewaris dan mereka didahulukan dari *baitul mal*, meskipun *baitul mal* itu telah tertata dengan baik. Alasan yang mendasari jawaban ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suriono dan Ibu Siti Aisyah Pinem⁵⁸ pertama, *zaw al-arham* meskipun ia tidak termasuk dalam kelompok ahli waris *ashabul furud* dan

⁵⁸ Bapak Suriono adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Barat. Sedangkan Ibu Aisyah Pinem adalah guru agama Islam beralamat di Jalan Sei Deli Kelurahan Silalas.

'asabah namun ia tetap memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sedangkan umat muslim yang akan menerima harta pewaris melalui *baitul mal* tidak memiliki hubungan apapun dengannya.

Kedua, dilihat dari segi kemanfaatan kepada pewaris, jika harta pewaris diserahkan kepada *zaw al-arham* ada kemungkinan mereka akan bersedekah atau berwakaf atas nama pewaris dari harta tersebut, namun apabila diserahkan kepada umat muslim melalui *baitul mal* sulit diharapkan mereka akan melakukan hal tersebut.

Ketiga, jika pewaris meninggal dalam keadaan meninggalkan utang dan tidak memiliki ahli waris kecuali *zaw al-arham*, maka biasanya utang itu akan ditanggung oleh mereka demi menjaga nama baik pewaris. Untuk itu adalah suatu yang adil apabila mereka mewarisi harta peninggalan pewaris ketika tidak ada ahli waris yang lain yang lebih utama.

Sisanya, sebanyak 27 % menyatakan bahwa *baitul mal* didahulukan dari pada *zaw al-arham*. Hal ini didasarkan pada faham yang berkembang, yaitu menurut mazhab Syafi'i – mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat muslim Indonesia – *baitul mal* didahulukan dari *zaw al-arham* kecuali jika *baitul mal* tidak tertata secara baik.

Data ini selain berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai *zaw al-arham* juga menjelaskan tentang hubungan masyarakat muslim di daerah ini dengan mazhab yang dianutnya. Menurut Rachmat Djatnika mazhab yang dianut oleh masyarakat muslim Indonesia adalah mazhab Syafi'i,⁵⁹ namun kenyataan di lapangan berkata lain, mayoritas

⁵⁹ Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia* Dalam Abdurrahman Wahid et.all, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 229.

responden, baik sadar atau tidak, tidak lagi berpegang secara rigid terhadap mazhab Syafi'i tersebut.

Dilihat dari sistem peralihan harta pewaris kepada *zaw al-arham*, mayoritas responden (66 %) menyatakan peralihan itu dilakukan melalui sistem kewarisan, sedangkan yang berpendapat melalui wasiat ada 26 %, dan wasiat wajibah ada 8 %. Lebih lanjut 46 % responden yang memilih melalui sistem kewarisan menyatakan memilih pendekatan rahmi, yaitu harta waris dibagi rata diantara para ahli waris *zaw al-arham*, 40 % memilih pendekatan *qarabat*, yaitu *zaw al-arham* dari jalur anak didahulukan dari jalur ayah, jalur ayah didahulukan dari jalur saudara, dan jalur saudara didahulukan dari jalur paman. Hanya 14 % responden yang memilih pendekatan *tanzil* atau penggantian tempat ahli waris. Mayoritas responden (73 %) menyatakan bahwa penggantian tempat ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat disebut atau disamakan dengan *zaw al-arham*.

Mengenai respon masyarakat terhadap legislasi peraturan *zaw al-arham* 80 % menyatakan setuju *zaw al-arham* diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantara alasannya sebagaimana dikemukakan oleh Sayuddin sagala agar institusi *zaw al-arham* memiliki kepastian hukum sehingga peralihan harta pewaris kepada *zaw al-arham* dapat dilaksanakan dengan baik. Selebihnya (20 %) menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa *zaw al-arham* masuk dalam wilayah hukum privat yang tidak perlu diatur oleh negara.

BAB IV

KESIMPULAN

Terminologi *zaw al-arham* adalah satu istilah hukum yang muncul di era tabi'in. materi yang menjadi isu sentral dalam kajian istilah ini tidak lain adalah apakah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, namun tidak termasuk ke dalam *zawil furud* dan 'asabah masih dapat menerima harta pewaris dengan jalan kewarisan atau tidak ?

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian

1. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, *zaw al-arham* tidak berhak menerima harta warisan dengan jalur kewarisan.
2. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, *zaw al-arham* termasuk ahli waris, dan oleh karenanya dapat menerima harta warisan jika *ashabul furud* dan 'asabah tidak ada.

Dari hasil penelitian ditemukan :

1. Mayoritas responden (73 %) menyatakan bahwa *zaw al-arham* berhak terhadap harta peninggalan pewaris, jika tidak ada *ashabul furud* atau 'asabah.
2. Sama dengan prosentase di atas, yaitu 73 % responden menyatakan bahwa *zaw al-arham* didahulukan dari *baitul mal* dalam hal penerimaan harta waris.
3. Dalam hal peralihan harta waris kepada *zaw al-arham*, mayoritas responden (46 %) menyatakan memilih sistem *rahmi*, yaitu seluruh harta waris dibagi rata diantara ahli waris *zaw al-arham*. Hal ini

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Muhammad, *Tuhfah al-Ahwazi Syarh Jami' at-Turmuzi*, Juz VI, (Beirut : Dar Ihya at-Turas al-Arabiyy, tt)

Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Husein bin Ali, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Ad-Dasuqi Muhammad bin Ahmad bin Arafah, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996)

Al-Qazwini, Al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Asriyah, 2006)

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986)

As-Sarkhasi, Syams ad-Din Abu Bakr Muhammad, *Al-Mabsut*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2000)

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Kitab wa as-Sunnah*, terj. Zaid Hussin al-Hamid, *Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1988)

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973)

Asy-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Alfaz al-Minhaj*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)

Djatnika, Rachmat, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia* Dalam Abdurrahman Wahid et.all, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993)

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT AMA'ARIF, 1971)

Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1995)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999)

Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Bandung : Cita Pustaka Media, 2007)

Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Juz. VI, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)

R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992)

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung : al-Ma'arif, 1975)

Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1987)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1989)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008)

-----, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Logos, 1999)



IA
2
M